

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : LYDIAH PERMATA SARI
NPM : 1705170282
PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LYDIAH PERMATA SARI
N P M : 1705170282
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DELI
SERDANG

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., Ak, M.Si, CA., CPA)

Penguji II

(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si) *

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LYDIAH PERMATA SARI

N.P.M : 1705170282

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DELI
SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 28 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lydiah Permata Sari

NPM : 1705170282

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



LYDIAH PERMATA SARI

ABSTRAK

Lydia Permata Sari. 1705170282. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi , Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Masalah dalam penelitian ini adalah belum tercapainya target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang, dimana pajak daerah yang diterima pemerintah akan digunakan untuk kemajuan daerah tersebut, baiklah melalui sarana maupun prasarana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), PDRB Perkapita , inflasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, Analisis regresi linier berganda, Uji asumsi klasik. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji f.

Hasil penelitian secara sebagian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan jumlah penduduk penting positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dengan nilai signifikansi masing – masing sebesar 0.022, 0.017 dan 0.031. Sedangkan untuk variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dengan nilai signifikansi sebesar 0.69. Namun secara simultan PDRB, PDRB Perkapita , inflasi dan jumlah penduduk penting positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah .

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Inflasi, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pajak Daerah

ABSTRACT

Lydia Permata Sari. 1705170282. Analysis Influencing Factors Reception Regional Taxes in Deli Serdang Regency. Thesis, Department Accounting , Faculty Economics and Business, University of Muhammadiyah North Sumatra, 2022.

Problem in study this is not yet achievement of revenue target tax area in Deli Serdang Regency, where tax accepted area government will used for progress area that 's fine through means nor infrastructure . Destination from study this is for analyze influence product gross regional domestic (GDP), per capita GRDP , inflation and total population to reception tax areas in Deli Serdang Regency in 2015 – 2020.

Source of data in study this namely primary data , primary data is data which obtained by live by researcher . Data primary in researchv this namely the data obtained and collected by doing study by live in Body Regional Income Deli Kabupaten County Serdang. Data analysis used is statistics descriptive , Analysis multiple linear regression , test assumptions classic . Hypothesis tested with using t test and f test.

Research results by Partial show that product gross regional domestic (GDP), GRDP Per capita and total population take effect positive significant to reception tax area in Deli Serdang Regency with Mark significance each of 0.022, 0.017 and 0.031. Whereas for variable inflation no have significant influence to reception tax area in Deli Serdang Regency with Mark significance of 0.69. However by Simultaneous GRDP, GRDP Per capita , inflation and total population take effect positive significant to reception tax area .

Keywords: Gross Regional Domestic Product (GRDP), Per capita GRDP, Inflation, Population, Regional Tax Revenue

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang**” guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda **Rusli Effendi** dan Ibunda **Aisyah** yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi, dukungan, doa dan restu kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir disetiap langkah dan setiap aktivitas.
2. Ibu **Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam membuat proposal penelitian ini.
3. Bapak **Dr. H Agussani, M.A.P**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H. Januri, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian.

Akhir Kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, 11 Maret 2022

Lydia Permata Sari
1705170282

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Identifikasi Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.2 Pajak Daerah.....	15
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita.....	24
2.1.5 Inflasi.....	25
2.1.6 Jumlah Penduduk.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.2.1 Variabel Dependen (Y).....	38
3.2.2 Variabel Independen (X).....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3.1 Tempat Penelitian.....	39

3.3.2 Waktu Penelitian.....	39
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.5.1 Jenis Data	40
3.5.2 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.7.1 Analisis Data Deskriptif.....	41
3.7.2 Uji Regresi Berganda.....	45
3.7.3 Uji Hipotesis.....	47
3.7.4 Koefisien Determinasi (R ²).....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang.....	49
4.2 Analisis Data.....	50
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.3 Uji Regresi Berganda.....	59
4.2.4 Uji Hipotesis.....	60
4.2.5 Koefisien Determinasi	63
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang.....	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	6
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	40
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi.....	44
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Berganda.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan.....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas : Grafik Histogram.....	54
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal P-Plot.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana masyarakat bebas memberikan pemikirannya atau pendapatnya guna membangun lebih baik negara Indonesia. Masyarakat bebas berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan potensi diri maupun daerahnya. Setiap daerah memiliki regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berpartisipasi untuk memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut guna merancang, membangun, dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini pembangunan infrastruktur sudah semakin merata antara pusat dengan daerah. Pembangunan ini dilakukan secara berkesinambungan demi mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dari pembangunan ini bisa bersifat materiil maupun spiritual serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk dapat mencapai tujuan ini pemerintah lebih menekankan pada pembangunan daerah untuk dapat menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Guna melaksanakan program di atas pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kebijakan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diluar pemisahan turut campur dari pemerintah pusat karena saat ini sistem pengelolaannya menganut sistem desentralisasi yaitu segala pengelolaan dan pemberian kebijakannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah, memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik pemerintah daerah membutuhkan kemampuan keuangan yang cukup agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu guna mewujudkan kemampuan keuangan yang cukup pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi daerah yang dimilikinya (Ismartani dalam Witantri, 2008).

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Selain berperan sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetory*), pajak juga merupakan alat pengatur (*regulatory*) alokasi dan distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, ditentukannya target perolehan pajak daerah setiap tahunnya bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri agar kontribusinya terhadap PAD dapat optimal apabila realisasi penerimaannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Dispenda Propinsi Sumatera Utara, belum mampu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang diharapkan, serta anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang baik sebab hasil realisasi masih jauh dari harapan yang diinginkan (Zulia Hanum, 2010).

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki berbagai kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan pasar, kegiatan usaha menengah, wisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Deli Serdang. Melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintah yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah pajak yang diharapkan pendapatan daerah akan meningkat setiap tahunnya. Potensi perekonomian Kabupaten Deli Serdang berasal dari perdagangan, perhotelan, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian Gol.C, parkir, ABT, dan sarang burung walet.

Tabel 1.1 Struktur Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2020

No.	Jenis Pajak Daerah	Keterangan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	Target	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	4.500.000.000,00	7.000.000.000,00	7.225.000.000,00
		Realisasi	1.224.690.123,94	1.955.295.541,18	2.732.104.583,24	5.896.302.010,88	6.578.001.985,20	3.143.851.937,00
		%	61,23	97,76	109,28	131,03	93,97	43,51
2	Pajak Restoran	Target	13.200.000.000,00	14.000.000.000,00	21.000.000.000,00	29.000.000.000,00	38.000.000.000,00	35.275.000.000,00
		Realisasi	15.763.638.400,99	17.626.828.769,32	22.356.815.491,76	27.672.026.964,86	30.786.202.584,13	18.500.845.680,13
		%	119,42	125,91	106,46	95,42	81,02	52,45
3	Pajak Hiburan	Target	726.000.000,00	900.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.975.000.000,00
		Realisasi	902.917.791,55	951.263.653,28	1.525.251.698,50	2.184.890.157,22	3.982.072.635,00	1.728.960.967,00
		%	124,37	105,70	101,68	72,83	132,74	58,12
4	Pajak Reklame	Target	6.050.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00	15.500.000.000,00	13.600.000.000,00
		Realisasi	4.557.227.734,51	5.190.640.806,77	6.561.008.145,48	6.522.718.231,63	6.545.031.901,29	6.881.984.169,00
		%	75,33	74,15	87,48	76,74	42,23	50,60
5	Pajak Penerangan Jalan	Target	82.330.092.000,00	91.266.468.000,00	140.000.000.000,00	167.500.000.000,00	241.000.000.000,00	287.471.250.000,00
		Realisasi	101.477.250.650,00	108.019.804.694,00	136.452.392.802,00	156.048.741.298,00	171.090.458.928,00	172.394.738.790,00
		%	123,26	118,36	97,47	93,16	70,99	59,97
6	Pajak Bahan Galian Gol. C	Target	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	11.900.000.000,00
		Realisasi	6.722.474.350,00	8.854.760.525,00	5.863.937.804,00	11.573.024.060,50	1.613.802.580,00	743.346.884,00

		%	67,22	88,55	48,87	89,02	12,41	6,25
7	Pajak Parkir	Target	20.000.000,00	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	8.925.000.000,00
		Realisasi	17.600.000,00	5.672.677.150,00	7.286.765.617,20	8.797.807.265,00	9.654.977.990,00	4.982.667.354,00
		%	88,00	113,45	91,08	103,50	107,28	55,83
8	Pajak ABT	Target	4.400.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.750.000.000,00
		Realisasi	4.230.119.204,00	9.819.201.747,75	10.455.827.227,14	13.300.562.363,40	7.798.391.936,45	6.016.319.386,00
		%	96,14	109,10	87,13	91,73	51,99	47,19
9	Pajak Sarang Burung Walet	Target	7.500.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	50.000.000,00
		Realisasi	9.231.624.787,44	20.500.000,00	16.000.000,00	19.500.000,00	22.000.000,00	12.600.000,00
		%	123,09	102,50	72,73	88,64	100,00	25,20
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	Target	228.000.000.000,00	228.000.000.000,00	237.500.000.000,00	237.100.000.000,00	327.860.220.000,00	259.250.000.000,00
		Realisasi	124.938.033.757,00	133.372.917.796,00	141.364.693.425,00	154.756.477.557,00	197.077.538.748,00	184.662.461.562,00
		%	54,80	58,50	59,52	65,27	60,11	71,23
11	Pajak BPHTB	Target	108.900.000.000,00	120.000.000.000,00	140.000.000.000,00	235.000.000.000,00	276.000.000.000,00	242.250.000.000,00
		Realisasi	99.995.135.319,20	135.000.961.013,50	218.995.236.199,71	171.557.548.292,48	217.414.634.498,72	197.248.899.169,64
		%	91,82	112,50	156,43	73,00	78,77	81,42

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang (data diolah)

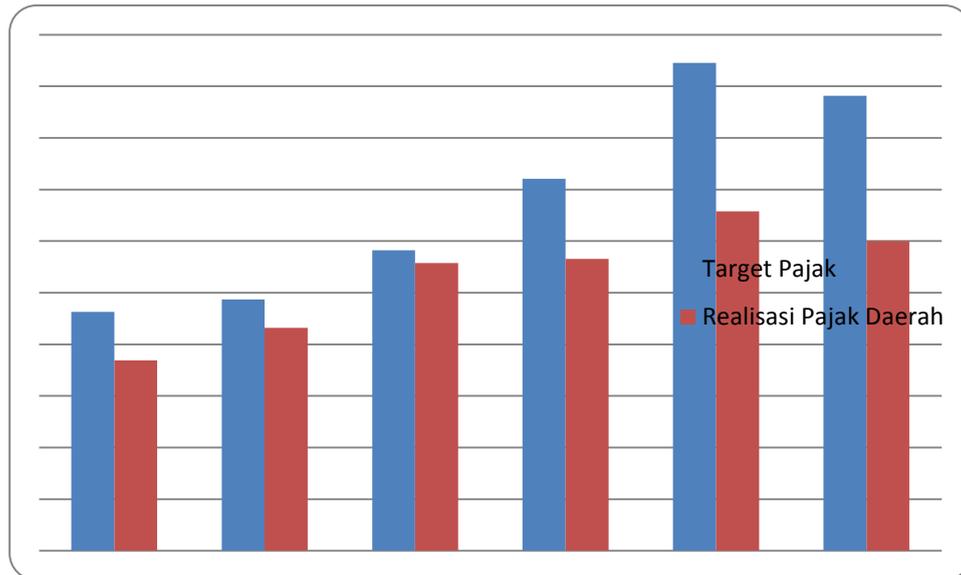
Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap pajak daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2015 hingga tahun 2020 berasal dari sektor pajak hiburan. Pada tahun 2015 hingga 2017 sektor pajak hiburan memberikan sumbangsi terhadap pajak daerah yang nilainya lebih besar daripada target yang telah ditetapkan, yaitu masing – masing sebesar, 124,37%, 105,70% dan 101,68%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dan memberikan sumbangsi sebesar 72,83%. Tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 132,74% dan melebihi target yang telah ditetapkan, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar 58,12%. Menurut data yang diperoleh dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2015 - 2020**

Tahun	Target Pajak Daerah (Dalam Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Dalam Rupiah)	%
2015	463.126.092.000	369.060.712.118,63	79,69
2016	487.186.468.000	432.131.845.878,56	88,7
2017	582.022.000.000	557.559.474.513,97	95,8
2018	720.622.000.000	565.695.087.233,91	78,5
2019	945.382.220.000	657.659.715.077,32	69,57
2020	881.671.250.000	600.005.646.014,17	68,05

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana desa, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak maksimal. Jika target pajak yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik maka daerah Kabupaten Deli Serdang dapat lebih maju lagi pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2020

Pada tabel 1.2 dan gambar 1.1 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di daerah Deli Serdang pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kontribusi dari pajak daerah pada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2015 – 2019 realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 realisasi pajak daerah mengalami penurunan. Jumlah realisasi pajak daerah terhadap targetnya secara umum belum memenuhi dengan apa yang ditargetkan. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan yang muncul adalah belum maksimalnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang sehingga yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah, menurut Tahwin (2013) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh secara

langsung terhadap Pajak Daerah. Menurut Sania dkk (2018) jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan pajak daerah yang dimiliki.

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya dengan menggali potensi yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDRB, PDRB perkapita, inflasi dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa dan sektor-sektor pembentuk PDRB lainnya juga akan mengalami kenaikan serta tentu akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sebagai indikator perekonomian yang terkait dengan pasar, nilai inflasi berfluktuasi dengan pengaruh dari berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat, kondisi banyaknya barang yang beredar dan sebagainya. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum secara terus-menerus. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menaikkan tarif pajak pada harga atau jasa yang bersangkutan (Arianto dan Padmono, 2014).

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak daerah juga meningkat (Saputra dkk, 2014). Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sania dkk (2018)

menyatakan adanya pengaruh positif variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk Tahun 2015 - 2020

Tahun	PDRB (Triliun Rupiah)	PDRB Perkapita (Juta Perkapita/Tahun)	Inflasi (%)	Jumlah Penduduk
2015	79.73	37.81	3.32	2.029.308
2016	85.15	41.08	6.60	2.072.521
2017	93.19	44.07	3.18	2.114.627
2018	101.06	46.88	1.00	2.155.625
2019	109.33	49.79	2.43	2.195.709
2020	110.14	57.02	1.76	1.931.441

Sumber: Badan Pusat Statistik Deli Serdang

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik mengangkat judul **Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang** pada tahun 2015 – 2020 dengan pajak daerah sebagai variabel dependen dan PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk sebagai variabel independen.

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan pada Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 – 2020.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya target penerimaan pajak pada Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 - 2020

2. Naik turunnya persentasi realisasi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 - 2020

1. 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015-2020?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015-2020?
3. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015-2020?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015-2020?

2. 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020

3. 1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sewaktu duduk di bangku perkuliahan.

2. Bagi pemerintah daerah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah mengenai cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari pajak daerah.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

4. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lainnya sebagai referensi dan rujukan bagi pengembangan dan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pandiangan (2008:5) “pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup besar kontribusinya bagi pembangunan daerah dengan kata lain pajak merupakan penerimaan pajak yang diperoleh berguna untuk pelaksanaan maupun peningkatan pembangunan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat”. “Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya” (Mangkoesoebroto dalam Sutrisno, 2002). “Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi rakyat” (Zulia Hanum, 2010)

“Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 47). Pengertian pajak daerah yang lainnya adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Murbanto, 2017: 141). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara berdasarkan Undang-Undang Pajak dengan kekuatan

Undang- Undang serta aturan pelaksanaan tanpa ada kontaprestasi langsung dalam pembayaran pajak maka para pembayar pajak tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang apabiladari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak daerah adalah salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi pajak daerah yaitu:

1. Fungsi sumber pendapatan (budgetary)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi mengatur (regulatory)

Mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Distribusi Pajak

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, penerimaannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau sekelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Pajak Daerah

“Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat” (Sjafrizal, 2014). Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian Pajak Daerah sendiri menurut Davey adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau dibebani pungutan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.2.1 Jenis - Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan UU N0. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Melihat pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang jenis-jenis pajak provinsi ditegaskan dua hal prinsip mengenai hal tersebut, yakni:

1. Bahwa pemerintah daerah provinsi dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.
2. Khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

3. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan UUN0. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak sebelas jenis, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 69). Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum, dan jasa sewa ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut: penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pajak Restoran

“Restoran adalah tempat penyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau

catering” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 71). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Pengecualian objek pajak restoran yakni: pelayanan usaha jasa boga atau catering, pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah Subjek pajak restoran yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran yakni pengusaha restoran. Tarif restoran paling tinggi 10%.

3. Pajak Hiburan

“Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 72). Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang dipungut bayaran. Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut biaya seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan maksimal 35% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

4. Pajak Reklame

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang” (Kurniawan dan

Purwanto, 2004: 73). Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame yakni semua penyelenggara reklame. Objek pajak reklame dikecualikan terhadap: penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya dan penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesana reklame. Wajib pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif pajak reklame maksimal 25% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan

“Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 74). Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan maksimal 10%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan antara lain: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dan lain-lain yang termasuk kedalam bahan mineral bukan

logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak bahan mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan maksimal 20% yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

7. Pajak Parkir

“Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran” (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 77). Tarif pajak parkir maksimal 20% yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan komersial. “Tarif pajak air tanah maksimal 20% sesuai peraturan daerah” (Murbanto, 2017: 149).

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet maksimal 10% sesuai peraturan daerah.

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maksimal 0,3 % sesuai peraturan daerah.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Tarif pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maksimal 5% sesuai dengan peraturan daerah. Melihat pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah “keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun waktu satu tahun” (Nurohman, 2010). Menurut Sukirno (dalam Artha, 2016) “PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan

faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu”, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan bertambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat maka semakin tinggi kemampuan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) biasanya digunakan untuk menganalisis pertumbuhan atau kontribusi sektoral oleh para ekonom, peneliti maupun perencana pembangunan. Akan tetapi, menurut Tarigan (2005:37) “khusus untuk perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayahnya”. Menurut Arsyad (1999:21) “pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak”. PDRB merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tambahan produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu wilayah pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Prishardoyo (2008:29) menyatakan “tingkat perkembangan PDRB sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi”. Sukirno (2004:54) menyatakan bahwa “peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.

PDRB dapat dilihat dari tiga sisi: produksi, pengeluaran, serta pendapatan. Di sisi produksi, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu yaitu sektor rumah tangga (berupa konsumsi rumah tangga), sektor swasta (pembentukan barang modal/investasi), sektor pemerintah (konsumsi pemerintah di luar pembayaran non jasa/ *transfer non payment*), serta sektor luar negeri (ekspor dan impor). Sementara itu di sisi pendapatan, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut pada suatu periode berupa gaji dan sejenisnya, sewa modal, bunga dan sejenisnya, serta laba yang dihasilkan oleh pengusaha. Dari sisi mana pun PDRB diukur akan dihasilkan angka yang sama (setelah dilakukan penyesuaian dan koreksi) (kemenkeu RI).

Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (*current year price*) dan atas dasar harga konstan (*base year price*). Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

“Besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan

setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya” (Waluyo 2000). “Kondisi ini diperhitungkan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah bersangkutan yang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita” (Insukindro, 1994). PDRB perkapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah tingkat provinsi atau kabupaten, sedangkan PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

PDRB perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi. “Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak” (Miyasto, 1993).

3. Inflasi

2.1.4.1 Definisi

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang lainnya seperti makanan, minuman, rokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, rekreasi, transportasi, olahraga, komunikasi,

dan jasa keuangan. Sehingga terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi sebagai syarat inflasi menurut Boediono (1999) yaitu:

1. Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum.
3. Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum tidak akan memunculkan inflasi, jika hanya terjadi sesaat. Misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Peristiwa inflasi ini dapat memberikan dampak yang baik maupun buruk tergantung tinggi rendahnya persentase tingkat inflasi. Jika inflasi hanya pada persentase tingkat ringan, inflasi akan memberikan hal positif terhadap kondisi ekonomi, diantaranya meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan daerah, mendorong orang untuk gairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun apabila inflasi pada persentase yang parah, maka akan mengakibatkan kekacauan ekonomi, aktivitas menabung dan investasi menurun, harga barang-barang menjadi tinggi, masyarakat menjadi kesulitan untuk mengimbangi biaya konsumsi dan aktivitas ekonominya.

Jenis-jenis inflasi ditinjau dari parah tidaknya suatu inflasi yaitu:

1. inflasi ringan $<10\%$
2. inflasi sedang $10\%-30\%$
3. inflasi berat $30\%-100\%$
4. hiperinflasi $>100\%$

Inflasi berdasarkan sumbernya yaitu:

5. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini ditimbulkan karena permintaan dalam negeri (baik pemerintah maupun masyarakat) akan berbagai barang sangat kuat dan besar serta melebihi keluaran (output) yang ada dalam perekonomian tersebut.

6. *Cosh Push Inflation*

Kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi (*cosh push inflation*), atau dapat pula terjadi karena adanya buruh menuntut upah (*wage push inflation*).

2.1.4.2 Efek Inflasi

Menurut Nopirin (2010) “inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik”. Efek-efek inflasi tersebut adalah:

1. Efek terhadap pendapatan

Seseorang yang menumpuk uang dan seseorang yang memiliki pendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi. Namun beberapa pihak yang memperoleh pendapatan dengan presentase lebih besar dibandingkan laju inflasi dan pihak yang memiliki kekayaan bukan uang yang mengalami peningkatan nilai dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi justru akan mengalami keuntungan. Sebagai contoh seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap Rp 3.000.000 pada kondisi normal sebelum inflasi dapat menggunakan gajinya untuk membeli berbagai barang maupun jasa, namun dengan adanya inflasi gaji tersebut hanya dapat dibelanjakan terbatas pada beberapa barang dan jasa.

2. Efek terhadap efisiensi

Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Barang akan didistribusikan lebih besar kepada kelompok yang mampu memenuhi harga yang ditentukan pada saat inflasi.

3. Efek terhadap output

Inflasi dapat menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi, dampak yang akan ditemukan adalah sebaliknya, yakni penurunan output yang disebabkan oleh produsen tidak mampu memenuhi biaya produksi suatu barang ataupun jasa.

1. Jumlah Penduduk

Menurut Budiharjo (2003:25) mengatakan bahwa, “jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban”. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Menurut Meier (1995:39), “jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar”. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Menurut Todaro

(2006:14) bahwa “besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan”. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indek Foster Greer Thorbecke (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Jumlah Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. (Sukirno, 2004).

Robert Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan (Mantra, 2000:26). Malthus sangat prihatin bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Sehingga, tegadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Dalam waktu 200 tahun, perbandingan itu akan menjadi 256 : 9. (Mantra, 2000:49) Malthus ditentang oleh para sagana lain, diantaranya Michael Sadler yang mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada disuatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. (Mantra, 2000:53).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Syahru Romadhon (2017)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 -2016	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumlah Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Balik Nama dan Inflasi sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen	PDRB berpengaruh signifikan positif, jumlah tenaga kerja asing berpengaruh signifikan negatif, dan inflasi berpengaruh signifikan positif, sedangkan jumlah penerbitan STNK balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Putu Arinda Krisnayanthi dan Ni Luh Karmini (2021)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel independen dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen	Secara simultan, variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Secara parsial, variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk

			domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
Stenly Andry Ririhena, Marcus R, Maspaitella dan Rumas Alma Yap (2021)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2017	Pendapatan Per-Kapita, Jumlah Pengunjung Objek Wisata dan Tingkat Hunian Hotel sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Daerah sebagai variabel dependen	Secara parsial pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Manokwari, jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Manokwari dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif dan signifikansi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manokwari.
Dian Purnama Sari dan Fitrawati Ilyas (2016)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu	Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk dan Inflasi sebagai Variabel Independen dan Penerimaan Pajak Daerah sebagai Variabel Dependen	Pendapatan per kapita (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu.
Riza Alhusna	Faktor – Faktor	Modernisasi Sistem	Modernisasi Sistem

Nursheha, Trisni Suryarini dan Kiswanto (2014)	yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Administrasi Perpajakan dan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Variabel Independen dan Pajak Daerah sebagai Variabel Dependen	Administrasi Perpajakan dan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada KPP Pratama Semarang Tengah Dua.
Suci Sukmawati (2018)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan	PDRB, Jumlah Pelanggan Listrik dan Inflasi sebagai Variabel Independen dan Penerimaan Pajak Daerah sebagai Variabel Dependen	PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan, sedangkan jumlah pelanggan listrik dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah pelanggan listrik dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan.
Anatoly Aditya Saputra (2018)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri sebagai Variabel	PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri tidak

		Independen dan Penerimaan Pajak Daerah sebagai Variabel Dependen	berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.
Tomo Pramana Putra dan Ali Anis	Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kot a Di Sumatera Barat	Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2) dan Hotel (X3). Variabel Dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak	Jumlah Penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat. PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat. Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang dimana faktor independennya adalah PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk serta variabel dependennya adalah pajak daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang, dapat membantu pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan

kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Menurut BPS (2017), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB.

“Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut” (Thamrin, 2001). Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. “Semakin tinggi nilai PDRB satu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut” (Thamrin dalam Nurrohman, 2010). Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin

tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurrohman (2010), PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Menurut teori yang telah dikemukakan oleh Keynes menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah fungsi dari pendapatan atau bisa digambarkan pada persamaan berikut:

$$Tx = f(Y) \dots \dots \dots (1)$$

Arti dari persamaan di atas mengandung makna besaran penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh besaran terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota, pajak daerah dipengaruhi oleh PDRB kabupaten/kota. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut maka semakin tinggi pula pendapatan seseorang atau pendapatan perkapita.

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

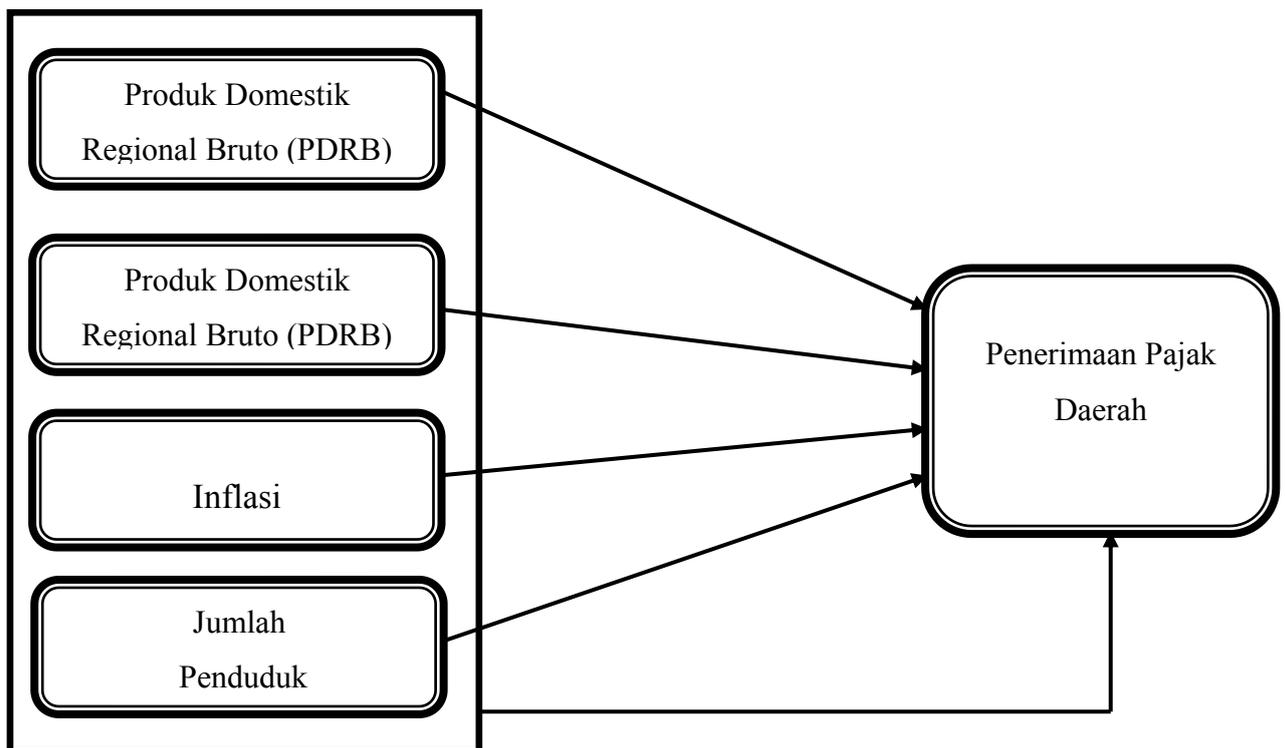
Dengan adanya inflasi tidak hanya berpengaruh pada kenaikan harga tetapi juga akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi akan mempengaruhi laju perekonomian suatu negara atau daerah. “Setiap negara atau daerah akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang” (Artha, 2016).

Apabila inflasi yang terjadi adalah inflasi ringan maka akan berpengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional atau daerah dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya pada saat terjadi hiperinflasi keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian menjadi lesu. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi meningkat maka penerimaan pajak daerah akan menurun (Boediono dalam Nurrohman, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan Nurrohman (2010) menyimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (*secular stagnation*) dalam Devas (1989) yang menerangkan bahwa “bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi”. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat

pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengaruh antara variabel (X1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (X2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, (X3) Inflasi dan (X4) Jumlah Penduduk terhadap variabel Y yaitu Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan kerangka konseptual dan

penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ : PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah

H₂: PDRB Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H₃: Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H₄: Jumlah Penduduk Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H₅: PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang akan diteliti dan data yang ditampilkan berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik, Sugiyono (2013). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015-2020

2. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara berdasarkan Undang-Undang Pajak dengan kekuatan Undang- Undang serta aturan pelaksanaan tanpa ada kontaprestasi langsung dalam pembayaran pajak maka para pembayar pajak tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang apabiladari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2. Variabel Independen (X)

1. Produk Domestik Regional Bruto (X₁)

PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga

berlaku (current year price) dan atas dasar harga konstan (base year price). Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar. Laju pertumbuhan PDRB diukur dengan rasio dengan satuan persen. Untuk menghitung laju pertumbuhan dapat dipakai rumus sebagai berikut:

$$G = \left[\frac{P_t}{P_{t-1}} \right] \times 100\%$$

Dengan:

G : Laju Pertumbuhan

P_t : PDRB adhk tahun ke-t

P_{t-1} : PDRB adhk sebelum tahun ke-t

2. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (X_2)

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Dalam penelitian ini digunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menurut Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020.

$$\begin{aligned} \text{PDRB Perkapita} &= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\% \\ \text{PDRB Perkapita} &= \text{PDRB per kapita kabupaten/kota } i \\ \text{PDRB} &= \text{PDRB ADHK/ADHB kabupaten/kota } i \\ \sum \text{Penduduk} &= \text{Jumlah penduduk kabupaten/kota } i \end{aligned}$$

3. Inflasi (X₃)

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang. Alat ukur inflasi adalah indeks harga konsumen. Untuk menghitung laju inflasi dapat dipakai rumus sebagai berikut:

$$LI_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}$$

Dimana:

LI_t = laju inflasi pada tahun t

IHK_t = indeks harga konsumen periode t

IHK_{t-1} = indeks harga konsumen periode t-1

4. Jumlah Penduduk (X₄)

Jumlah Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Waktu penelitian 2021-2022																											
	Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																											
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bimbingan Proposal																												
Seminar proposal																												
Bimbingan Skripsi																												
Sidang Meja Hijau																												

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan karakteristik terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah di daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2015-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk Kab. Deli Serdang selama 6 tahun mulai dari tahun 2015-2020.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa

besarnya PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

2. Studi Lapangan

Penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data merupakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Studi lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang dapat diperoleh dari laporan realisasi APBD.

3. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber dalam studi kepustakaan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1986 dan studi literatur dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel di media cetak ataupun elektronik baik yang ditulis oleh ahli perpajakan atau oleh sumber lain dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) “analisis data adalah cara – cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat diinterpretasi”. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan metode analisis data yang benar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018 : 19). Mean adalah nilai rata - rata dari setiap variabel penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian. Minimum adalah nilai paling rendah dari setiap variabel dalam suatu penelitian. Maksimum adalah nilai paling tinggi setiap variabel dalam suatu penelitian. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari data – data yang digunakan terhadap nilai rata – rata setiap variabel dalam suatu penelitian.

3.7.1.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi uji asumsi klasik. Untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1.2 Uji Normalitas

Ghozali (2018) mengatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini cara yang

dapat digunakan untuk melihat normalitas data adalah dengan menggunakan uji *kolmogorov – smirnov*. Uji *kolmogorov – smirnov* menggunakan bantuan SPSS versi 22 untuk mengetahui apakah data berdistribusi anormal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan yang diperoleh (*p value*) untuk variabel yang dianalisis lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan (α) sebesar 5%. Sebaliknya apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebelumnya ($\alpha = 5\%$), berarti data tidak berdistribusi normal. Selain itu, untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak juga dapat dilihat dari grafik plot linear. Apabila plot linear memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat dikatakan terdistribusi normal.

3.7.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018 : 107). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF menggunakan persamaan $VIF = 1/tolerance$

(Ghozali, 2018 : 107). Indikator dari nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut :

1. Apabila *tolerance value* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.
2. Apabila *tolerance value* < 0.10 dan VIF > 10 maka dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018 : 111). Uji autokorelasi dilaksanakan dengan uji *Durbin Watson*. Uji ini sangat populer digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model estimasi. Nilai hitung ini otomatis dihitung oleh SPSS ketika diregresi dan disediakan hasilnya bersama – sama dalam tampilan regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada ketentuan berikut :

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Jika	Keputusan
$d < d_l$ atau $d > 4 - d_l$	Terdapat autokorelasi
$d_u \leq d \leq 4 - d_u$	Tidak terdapat autokorelasi
$d_l < d < d_u$ atau $4 - d_u < d < 4 - d_l$	Tidak ada kesimpulan

Uji autokorelasi juga dapat dilakukan melalui uji Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Uji Run Test akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013).

3.7.1.5 Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2011 : 139) mengatakan “uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018 : 137). Heterokedastisitas pada penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji rank spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing – masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Adapun pedoman yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu :

1. Jika nilai signifikansi atau Sig (2-tailed) > dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi atau Sig (2-tailed) < dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas.

3.7.2 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata – rata populasi atau dengan nilai rata – rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang disajikan sebelumnya, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pajak Daerah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X_1 berubah sebesar 1 satuan

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

b_2 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X_2 berubah sebesar 1 satuan

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

b_3 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X_3 berubah sebesar 1 satuan

X_3 = Inflasi

b_4 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X_4 berubah sebesar 1 satuan

X_4 = Jumlah Penduduk

e = *Standar error*

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji Parsial (t – test)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan uji t adalah H1, H2, H3. Toleransi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$), dasar pengambilan keputusannya yaitu :

1. Jika nilai sig $> 0,05$ maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig $< 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabeladependen.

1. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara bersama – sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0.05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika probabilitas > 0.05 maka hipotesis ditolak.
2. Jika probabilitas < 0.05 maka hipotesis diterima.

3.7.4 Koefisien Determinasi (R²)

Penelitian ini menggunakan analisis koefisien determinasi, dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara 0 dan 1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018 : 97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57” - 3°16” Lintang Utara serta pada 98°33 - 99°27” Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan), dengan jumlah penduduk 1.931.441 jiwa (2020) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Deli Serdang 2021 dan merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten di provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Deli Serdang secara geografis terletak pada wilayah Pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara serta memiliki topografi kontur dan iklim yang bervariasi. Berdasarkan topografi wilayah Deli Serdang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (Draft Rumah Tangga Miskin Kabupaten Deli Serdang 2005, 2006):

1. Dataran Pantai: meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu), dengan luas 65.690 ha (26,36% dari luas kab. deli serdang)
2. Dataran Rendah: meliputi 11 kecamatan (Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Batang Kuis), dengan luas 71.934 ha (28,80 % dari luas kab. Deli Serdang)
3. Dataran Tinggi: meliputi 7 kecamatan (Kecamatan Biru-biru, STM Hilir, STM

Hulu, Gunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru dan Bangun Purba), dengan luas 112.147 ha (44,90% dari luas kab. Deli Serdang)

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 5 (lima) DAS yaitu Daerah Aliran Sungai Belawan, Belumai, Percut, Sungai Ular dan Sungai Deli dengan luas areal \pm 378.841 Ha, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Pada umumnya sub Daerah Aliran Sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi ketahanan pangan.

4.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda, yang menguji pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu gambaran atau suatu deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), dan nilai terendah (minimum). Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai maximum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari penerimaan pajak daerah, PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk. Hasil statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	6	79.73	110.14	96.4333	12.58918
PDRB PERKAPITA	6	37.81	57.02	46.1083	6.80464
INFLASI	6	1.00	6.60	3.0483	1.94645
JUMLAH PENDUDUK	6	-.120	.250	.06317	.134332
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	6	68.05	95.80	80.0517	10.76334
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel penerimaan pajak daerah, PDRB, PDRB Perkapita, inflasi, dan jumlah penduduk yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Penerimaan Pajak Daerah

Variabel penerimaan pajak daerah dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6 diperoleh nilai minimum 68.05 dan nilai maksimum 95.80. Nilai minimum menjelaskan mengenai nilai terendah penerimaan pajak daerah yang diperoleh sedangkan nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi penerimaan pajak daerah. Nilai rata-rata (mean) penerimaan pajak daerah yang 6 tahun dijadikan sampel secara keseluruhan sebesar 80.057 dan standar deviasi dari penelitian ini sebesar 10.76334

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel PDRB dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6 diperoleh nilai minimum 79.73 dan nilai maksimum 110.14. Nilai minimum menjelaskan mengenai nilai terendah PDRB yang diperoleh dari 6 tahun periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi PDRB yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata (mean) PDRB yang dijadikan sampel secara keseluruhan sebesar 96.4333 dan standar deviasi dari penelitian

ini sebesar 12.58918.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Variabel PDRB Perkapita dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6 diperoleh nilai minimum 37.81 dan nilai maksimum 57.02. Nilai minimum menjelaskan mengenai nilai terendah PDRB Perkapita yang diperoleh dari 6 tahun periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi PDRB Perkapita yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata (mean) PDRB Perkapita yang dijadikan sampel secara keseluruhan sebesar 46.1083 dan standar deviasi dari penelitian ini sebesar 6.80464.

5. Inflasi

Variabel inflasi dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6 diperoleh nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum 6.60. Nilai minimum menjelaskan mengenai nilai terendah inflasi yang diperoleh dari 6 tahun periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi inflasi yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata (mean) inflasi yang dijadikan sampel secara keseluruhan sebesar 3.0483 dan standar deviasi dari penelitian ini sebesar 1.94645.

6. Jumlah Penduduk

Variabel jumlah penduduk dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6 diperoleh nilai minimum -0.12 dan nilai maksimum 0.250. Nilai minimum menjelaskan mengenai nilai terendah jumlah penduduk yang diperoleh dari 6 tahun periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menjelaskan nilai tertinggi jumlah penduduk yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata (mean) jumlah penduduk yang dijadikan sampel secara keseluruhan sebesar 0.06317

dan standar deviasi dari penelitian ini sebesar 0.134332

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat memenuhi asumsi klasik regresi apabila data penelitian normal dan tidak terjadi gejala multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Analisis statistik adalah alat yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non parametric Kolmorov – Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka distribusi data tidak normal dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal. Adapun hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.09808308
Most Extreme Differences	Absolute	.210
	Positive	.210
	Negative	-.158
Test Statistic		.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

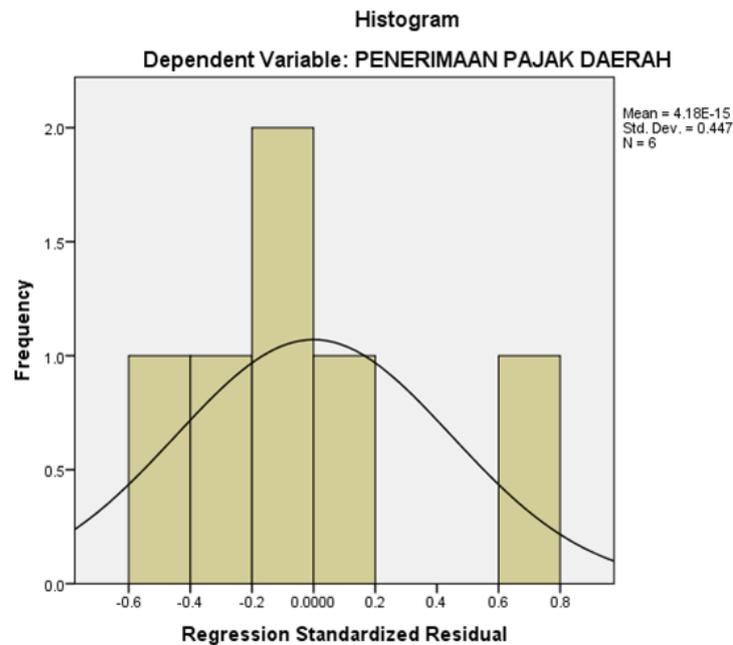
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed)

sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan data berdistribusi dengan normal. Hasil test ini didukung oleh hasil analisis grafik histogram yang menunjukkan grafik yang sempurna membentuk lonceng yang berbentuk simetris antara sisi kanan dan sisi kiri yang berarti data berdistribusi dengan normal.

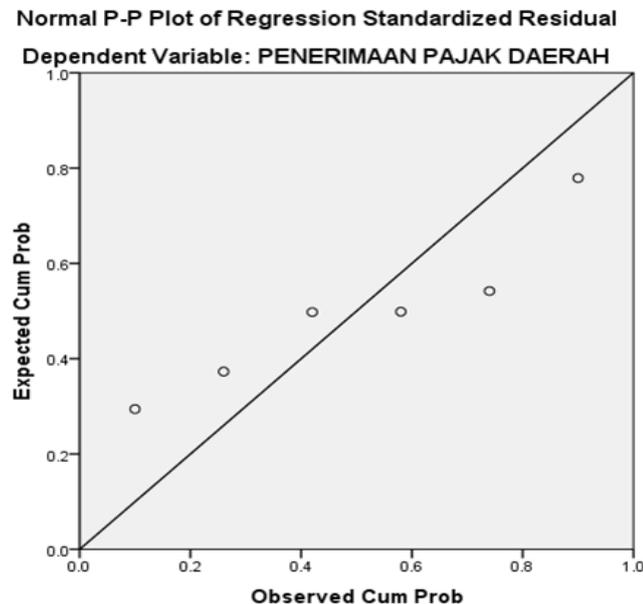


Sumber : Output SPSS 22, 2022

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas : Grafik Histogram

Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola yang tidak melebar ke kiri atau ke kanan. Pola yang ditunjukkan histogram berbentuk pola normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Untuk melakukan uji model regresi memiliki distribusi normal atau tidak, dapat juga dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik yang bersangkutan. Bila data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi kriteria asumsi normal, demikian sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji

normalitas dengan menggunakan grafik histogram penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Output SPSS 22, 2022

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal P-Plot

Pada gambar 4.2 grafik normal probability plot menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal .

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan melihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*variance inflati on factor*). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sedangkan VIF merupakan suatu faktor yang mengukur

seberapa besar kenaikan ragam dari koefisien penduga regresi dibandingkan terhadap variabel independen yang orthogonal jika dihubungkan secara linear. Regresi yang terbebas dari adanya multikolinearitas apabila nilai tolerance value $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Berikut hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	260.368	101.682		2.561	.237		
	PDRB	-.360	1.045	-.421	-.345	.789	.296	3.436
	PDRB PERKAPITA	-2.889	2.243	-1.826	-1.288	.420	.271	4.037
	INFLASI	-2.498	3.652	-.452	-.684	.618	.328	3.046
	JUMLAH PENDUDUK	-137.645	85.428	-1.526	-1.611	.354	.160	6.265

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai *tolerance* $0.296 > 0.10$ dan nilai VIF $3.436 < 10$. Variabel PDRB Perkapita memiliki nilai *tolerance* $0.271 > 0.10$ dan nilai VIF $4.037 < 10$. Variabel inflasi memiliki nilai *tolerance* $0.328 > 0.10$ dan nilai VIF $3.046 < 10$. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai *tolerance* $0.160 > 0.10$ dan nilai VIF $6.265 < 10$. Hal ini menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi juga dapat dilakukan melalui uji Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.47845
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	3
Z	-.456
Asymp. Sig. (2-tailed)	.648

a. Median

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan Run Test pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,648 > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi dapat teratasi menggunakan uji Run Test.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2018:137). Uji heterokedastisitas ini dapat dilakukan dengan uji rank spearman. Uji rank spearman dilakukan dengan mengkorelasikan masing – masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Hasil dari uji rank spearman dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.8. Dalam uji rank spearman pedoman yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu : jika nilai signifikan atau Sig (2-tailed) > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dan jika nilai signifikan atau Sig (2-tailed) < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

			Correlations				
			PDRB	PDRB PERKAPITA	INFLASI	JUMLAH PENDUDUK	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PDRB	Correlation Coefficient	1.000	1.000**	-.771	.986**	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.	.072	.000	.787
		N	6	6	6	6	6
	PDRB PERKAPITA	Correlation Coefficient	1.000**	1.000	-.771	.986**	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.	.072	.000	.787
		N	6	6	6	6	6
	INFLASI	Correlation Coefficient	-.771	-.771	1.000	-.725	-.143
		Sig. (2-tailed)	.072	.072	.	.103	.787
		N	6	6	6	6	6
	JUMLAH PENDUDUK	Correlation Coefficient	.986**	.986**	-.725	1.000	-.116
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.103	.	.827
		N	6	6	6	6	6
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.143	-.143	-.143	-.116	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.787	.787	.787	.827	.	
	N	6	6	6	6	6	

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Dari tabel 4.5 diatas variabel PDRB memiliki nilai signifikan sebesar $0.787 > 0.05$. Variabel PDRB Perkapita memiliki nilai signifikan sebesar $0.787 >$

0.05. Variabel inflasi memiliki nilai signifikan sebesar $0.787 > 0.05$. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai signifikan sebesar $0.827 > 0.05$, maka dapat disimpulkan nilai signifikan dalam setiap variabel independen nilainya > 0.05 yang berarti tidak terdapat heterokedastisitas.

4.2.3 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (variabel bebas lebih dari satu) terhadap variabel terikat. Hasil uji regresi pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.394	248.810		.190	.880
	PDRB	-1.181	4.117	-1.381	-.287	.022
	PDRB PERKAPITA	2.703	11.840	1.709	.228	.017
	INFLASI	4.222	11.131	.764	.379	.069
	JUMLAHPENDUDUK	75.147	253.753	.983	.296	.031

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 47.394 - 1.181X_1 + 2.703X_2 + 4.222X_3 + 75.147X_4$$

Adapun interpretasi regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 47.394 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan dan bernilai nol (0), maka akan meningkatkan variabel penerimaan pajak daerah sebesar 47.394.
2. Nilai koefisien regresi variabel PDRB (X1) sebesar -1.181 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap, maka akan menurunkan variabel penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 1.181.
3. Nilai koefisien regresi variabel PDRB Perkapita (X2) sebesar 2.703 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap, maka akan menaikkan variabel penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 2.703.
4. Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X3) sebesar 4.222 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan dengan asumsi variabel independent yang lain nilainya tetap, maka akan menaikkan variabel penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 4.222.
5. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X3) sebesar 75.147 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan dengan asumsi variabel independent yang lain nilainya tetap, maka akan menaikkan variabel penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 75.147.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independent secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini berarti bagaimana variabel independen, yaitu PDRB, PDRB

Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk secara parsial mempengaruhi variabel dependen, yaitu penerimaan pajak daerah. Uji t memiliki nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah :

1. H_0 diterima, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada signifikansi $\alpha = 0.05$ (5%)
2. H_0 ditolak, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada signifikansi $\alpha = 0.05$ (5%)

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.394	248.810		.190	.880
	PDRB	-1.181	4.117	-1.381	-.287	.022
	PDRB PERKAPITA	2.703	11.840	1.709	.228	.017
	INFLASI	4.222	11.131	.764	.379	.069
	JUMLAH PENDUDUK	75.147	253.753	.983	.296	.031

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah memiliki nilai sig. $< \alpha$ ($0,022 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita terhadap penerimaan pajak daerah memiliki nilai sig. $< \alpha$ ($0,017 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Pengaruh variabel inflasi terhadap penerimaan pajak daerah memiliki nilai sig. α ($0,069 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah memiliki nilai sig. $< \alpha$ ($0,031 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Pada dasarnya uji statistik F (uji simultan) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent secara bersama – sama berpengaruh pada variabel dependen pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Hasil dari uji simultan (uji statistik F) disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304.982	4	76.246	.278	.028 ^b
	Residual	274.265	1	274.265		
	Total	579.247	5			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

b. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, PDRB, PDRB PERKAPITA

Sumber : Output SPSS 22, 202

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 dan H_5 diterima yang berarti variabel

PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.5 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi umumnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	-1.367	16.56095

a. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, PDRB, PDRB PERKAPITA

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Sumber : Output SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.527. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 52,7% sedangkan sisanya sebesar 47.3% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model penelitian ini.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa hipotesis pertama (H1) **diterima**. Hal ini berkaitan dengan nilai signifikansi sebesar 0.022 lebih kecil dari 0.05 ($0.022 < 0.05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020.

Semakin tinggi nilai PDRB satu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin dalam Nurrohman, 2010). Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan semakin tinggi. Bila pertumbuhan daerah tinggi maka pendapatan masyarakat akan ikut meningkat dan kesejahteraan akan ikut meningkat. Dengan naiknya pendapatan maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Hal ini berdampak dengan penerimaan pajak yang akan ikut meningkat, karena kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anatoly Aditya (2018) yang menyatakan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnama dan Fitrawati Ilyas (2016) yang menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa hipotesis kedua (H2) **diterima**. Hal ini berkaitan dengan nilai signifikansi sebesar 0.017 lebih kecil dari 0.05 ($0.017 < 0.05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020. Masyarakat yang berpendapatan tinggi atau berpenghasilan yang lebih maka besar kemungkinan masyarakat tersebut untuk membayar pajak, baik itu pajak kekayaan atau pajak lainnya seperti pajak hotel restoran dll, karna masyarakat yang berpendapatan tinggi besar kemungkinan untuk mereka akan menginap dihotel, makan di restoran, dan juga pajak kendaraan yang mereka miliki.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tomo Pramana dan Ali Anis (2018) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0466. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stenly Andry, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa PDRB Perkapita memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manokwari dengan tingkat signifikansi sebesar 0.010.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa hipotesis kedua (H3) **ditolak**. Hal ini berkaitan dengan nilai signifikansi sebesar 0.069 lebih besar dari 0.05 ($0.069 > 0.05$). Hasil ini membuktikan bahwa

variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020.

Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang, karena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adalah buruh yang bergaji tetap, karena kenaikan harga barang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan yang setara dengan kenaikan inflasi. Sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dampak inflasi ini tidak begitu dirasakan karena berapapun tingginya harga suatu barang, maka barang tersebut tetap akan dibeli karena merupakan sifat konsumtif manusia. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut juga relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dampak kenaikan inflasi, maka tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Daerah karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih dapat menyerap hasil produksi yang dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut relatif stabil.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilda Sri dkk (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.97.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa hipotesis kedua (H4) **diterima**. Hal ini berkaitan dengan nilai signifikansi sebesar 0.031 lebih kecil dari 0.05 ($0.031 < 0.05$). Hasil ini membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Arinda dan Ni Luh (2017) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Daerah Sarbagita Provinsi Bali dan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2012) Jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Kristina (2010) Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena disebabkan oleh bertambahnya potensi jumlah penduduk untuk memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang dikenai pajak daerah. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka potensi jumlah wajib pajak juga akan semakin besar, sehingga variabel jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

5. Pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dari uji ANOVA (Analysis Of Variance) pada table di atas di dapat nilai tingkat signifikan sebesar 0,028 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestic regional bruto (PDRB), PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Alfian Nurrohman (2010) dengan judul penelitian “Analisis factor – factor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta (1994 – 2007).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 – 2020. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22. Data sampel sebanyak 6 data pengamatan tahun 2015 – 2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yang telah ditentukan ($0.022 > 0.05$). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) **diterima**.
2. Variabel PDRB Perkapita secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yang telah ditentukan ($0.017 < 0.05$). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) **diterima**.
3. Variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yang telah ditentukan ($0.069 > 0.05$). Dengan demikian H3 **ditolak**.
4. Variabel jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.031 < 0.05$. Dengan Demikian H4 **diterima**.

5. Variabel PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.028 lebih kecil dari nilai probabilitas yang telah ditentukan (0.05). Dengan demikian hipotesis kelima (H5) **diterima**.

1. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyadari masih terdapat banyak keterbatasan sehingga peneliti memberikan beberapa saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah :

1. Penelitian ini membahas pengaruh PDRB, PDRB Perkapita, inflasi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai R Square 52,7%. Dengan demikian terdapat 47,3% faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lainnya yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak daerah untuk diteliti.
2. Diharapkan kepada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang agar terus meningkatkan penerimaan pajak daerah dan juga lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka, M. d. (2014). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 , Hal : 90-101.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dwi Saputra, A. S. (2014). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Perpajakan* , Vol. 3, No. 1.
- Dwi, Y. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember. *Skripsi. Universitas Jember* .
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Cetakan ke IX*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Zulia. (2009). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, Vol. 10, No. 1.
- Hanum, Zulia. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, Vol. 11, No. 1.
- Hanum, Zulia. (2010). Penerapan Akuntansin Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Kultura*, Vol. 11, No. 1.
- Hanum, Zulia. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2.
- Hidayati Sania, d. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana* , 2.
- [Http://bapenda.deliserdangkab.go.id/web/web/grafik](http://bapenda.deliserdangkab.go.id/web/web/grafik)

- Insukindro. (1994). *Penerimaan Pajak*. Bandung: Djambatan.
- Kurniawan, P. d. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Edisi Pertama, Bayumedia Publishing.
- Miyasto. (1993). *Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Sisi Keadilan Dalam Perpajakan. Kajian Fiskal dan Moneter*. Jakarta: CFMS.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter (4 ed)*. Yogyakarta: BPF.
- Nurrohman, A. (2010). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (1994-2007). *Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta* .
- Nurrohman, A. (2010). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007). *Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta* .
- Padmono, P. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Volume 3, No.1.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang - Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2002-2005 . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* , Volume 1.
- Sinaga, M. (2017). *Keuangan Daerah*. Medan: USU Press.
- Sjafrizal, d. (2014). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 , Hal : 90-101.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sutrisno. (2002). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). *Thesis. Universitas Diponegoro Semarang* .
- Tahwin, M. (2013). Identifikasi Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan

Pajak Daerah. Vol. 18, No. 2.

Tarigan, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Daerah, N0. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Waluyo dan Wirawan B.I. (2001). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Witantri, E. (2008). *Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN dan Jumlah KWH (Kilowatt Hour) Terhadap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAMPIRAN
REKAP PAD 2015 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	463,126,092,000.00	369,060,712,118.63	79.69
2016	487,186,468,000.00	432,131,845,878.56	88.70
2017	582,022,000,000.00	557,559,474,513.97	95.80
2018	720,622,000,000.00	565,695,087,233.91	78.50
2019	945,382,220,000.00	657,659,715,077.32	69.57
2020	881,671,250,000.00	600,005,646,014.17	68.05

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2,000,000,000.00	1,224,690,123.94	61.23
2. Pajak Restoran	13,200,000,000.00	15,763,638,400.99	119.42
3. Pajak Hiburan	726,000,000.00	902,917,791.55	124.37
4. Pajak Reklame	6,050,000,000.00	4,557,227,734.51	75.33
5. Pajak Penerangan Jalan	82,330,092,000.00	101,477,250,650.00	123.26
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10,000,000,000.00	6,722,474,350.00	67.22
7. Pajak Parkir	20,000,000.00	17,600,000.00	88.00
8. Pajak ABT	4,400,000,000.00	4,230,119,204.00	96.14
9. Pajak Sarang Burung Walet	7,500,000,000.00	9,231,624,787.44	123.09
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228,000,000,000.00	124,938,033,757.00	54.80
11. Pajak BPHTB	108,900,000,000.00	99,995,135,319.20	91.82
A. TOTAL PAJAK DAERAH	463,126,092,000.00	369,060,712,118.63	79.69

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2,000,000,000.00	1,955,295,541.18	97.76
2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	17,626,828,769.32	125.91
3. Pajak Hiburan	900,000,000.00	951,263,653.28	105.70
4. Pajak Reklame	7,000,000,000.00	5,190,640,806.77	74.15
5. Pajak Penerangan Jalan	91,266,468,000.00	108,019,804,694.00	118.36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10,000,000,000.00	8,854,760,525.00	88.55
7. Pajak Parkir	5,000,000,000.00	5,672,677,150.00	113.45
8. Pajak ABT	9,000,000,000.00	9,819,201,747.75	109.10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20,000,000.00	20,500,000.00	102.50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228,000,000,000.00	133,372,917,796.00	58.50
11. Pajak BPHTB	120,000,000,000.00	135,000,961,013.50	112.50
A. TOTAL PAJAK DAERAH	487,186,468,000.00	426,484,851,696.80	87.54

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017			
JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2,500,000,000.00	2,732,104,583.24	109.28
2. Pajak Restoran	21,000,000,000.00	22,356,815,491.76	106.46
3. Pajak Hiburan	1,500,000,000.00	1,525,251,698.50	101.68
4. Pajak Reklame	7,500,000,000.00	6,561,008,145.48	87.48
5. Pajak Penerangan Jalan	140,000,000,000.00	136,452,392,802.00	97.47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12,000,000,000.00	5,863,937,804.00	48.87
7. Pajak Parkir	8,000,000,000.00	7,286,765,617.20	91.08
8. Pajak ABT	12,000,000,000.00	10,455,827,227.14	87.13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	16,000,000.00	72.73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237,500,000,000.00	141,364,693,425.00	59.52
11. Pajak BPHTB	140,000,000,000.00	218,995,236,199.71	156.43
A. TOTAL PAJAK DAERAH	582,022,000,000.00	553,610,032,994.03	95.12

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018			
JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4,500,000,000.00	5,896,302,010.88	131.03
2. Pajak Restoran	29,000,000,000.00	27,672,026,964.86	95.42
3. Pajak Hiburan	3,000,000,000.00	2,184,890,157.22	72.83
4. Pajak Reklame	8,500,000,000.00	6,522,718,231.63	76.74
5. Pajak Penerangan Jalan	167,500,000,000.00	156,048,741,298.00	93.16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13,000,000,000.00	11,573,024,060.50	89.02
7. Pajak Parkir	8,500,000,000.00	8,797,807,265.00	103.50
8. Pajak ABT	14,500,000,000.00	13,300,562,363.40	91.73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	19,500,000.00	88.64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237,100,000,000.00	154,756,477,557.00	65.27
11. Pajak BPHTB	235,000,000,000.00	171,557,548,292.48	73.00
A. TOTAL PAJAK DAERAH	720,622,000,000.00	558,329,598,200.97	77.48

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019			
JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7,000,000,000.00	6,578,001,985.20	93.97
2. Pajak Restoran	38,000,000,000.00	30,786,202,584.13	81.02
3. Pajak Hiburan	3,000,000,000.00	3,982,072,635.00	132.74
4. Pajak Reklame	15,500,000,000.00	6,545,031,901.29	42.23
5. Pajak Penerangan Jalan	241,000,000,000.00	171,090,458,928.00	70.99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13,000,000,000.00	1,613,802,580.00	12.41
7. Pajak Parkir	9,000,000,000.00	9,654,977,990.00	107.28
8. Pajak ABT	15,000,000,000.00	7,798,391,936.45	51.99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327,860,220,000.00	197,077,538,748.00	60.11
11. Pajak BPHTB	276,000,000,000.00	217,414,634,498.72	78.77
A. TOTAL PAJAK DAERAH	945,382,220,000.00	652,563,113,786.79	69.03

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020			
JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7,225,000,000.00	3,143,851,937.00	43.51
2. Pajak Restoran	35,275,000,000.00	18,500,845,680.13	52.45
3. Pajak Hiburan	2,975,000,000.00	1,728,960,967.00	58.12
4. Pajak Reklame	13,600,000,000.00	6,881,984,169.00	50.60
5. Pajak Penerangan Jalan	287,471,250,000.00	172,394,738,790.00	59.97
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	11,900,000,000.00	743,346,884.00	6.25
7. Pajak Parkir	8,925,000,000.00	4,982,667,354.00	55.83
8. Pajak ABT	12,750,000,000.00	6,016,319,386.00	47.19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	12,600,000.00	25.20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259,250,000,000.00	184,662,461,562.00	71.23
11. Pajak BPHTB	242,250,000,000.00	197,248,899,169.64	81.42
A. TOTAL PAJAK DAERAH	881,671,250,000.00	596,316,675,898.77	67.63

PDRB PERKAPITA 2015-2020	
Tahun	Jumlah
2015	37,81
2016	41,08
2017	44,07
2018	46,88
2019	49,79
2020	57,02

1. UJI NORMALITAS

1. Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.09808308
Most Extreme Differences	Absolute	.210
	Positive	.210
	Negative	-.158
Test Statistic		.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

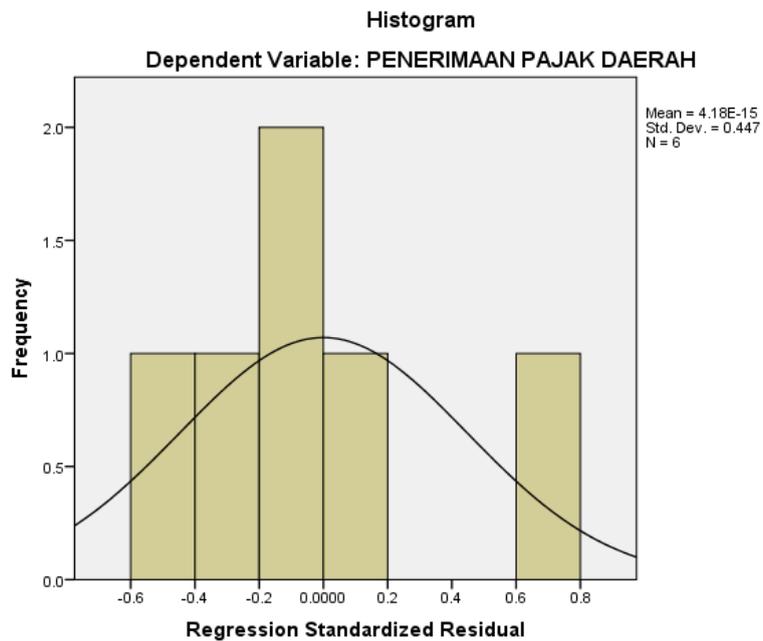
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

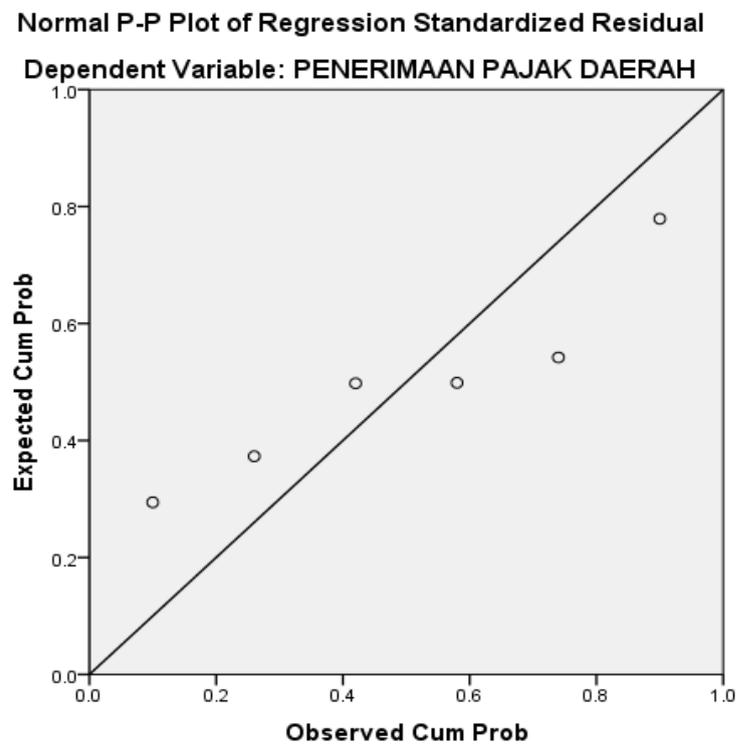
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Grafik Histogram



3. P-PLOT



4. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	260.368	101.682		2.561	.237		
	PDRB	-.360	1.045	-.421	-.345	.789	.296	3.436
	PDRB PERKAPITA	-2.889	2.243	-1.826	-1.288	.420	.271	4.037
	INFLASI	-2.498	3.652	-.452	-.684	.618	.328	3.046
	JUMLAH PENDUDUK	-137.645	85.428	-1.526	-1.611	.354	.160	6.265

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

5. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.47845
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	3
Z	-.456
Asymp. Sig. (2-tailed)	.648

a. Median

6. Uji Heterokedastisitas

Correlations

			PDRB	PDRB PERKAPITA	INFLASI	JUMLAH PENDUDUK	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PDRB	Correlation Coefficient	1.000	1.000**	-.771	.986**	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.	.072	.000	.787
		N	6	6	6	6	6
	PDRB PERKAPITA	Correlation Coefficient	1.000**	1.000	-.771	.986**	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.	.072	.000	.787
		N	6	6	6	6	6
	INFLASI	Correlation Coefficient	-.771	-.771	1.000	-.725	-.143
		Sig. (2-tailed)	.072	.072	.	.103	.787
		N	6	6	6	6	6
	JUMLAH PENDUDUK	Correlation Coefficient	.986**	.986**	-.725	1.000	-.116
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.103	.	.827
		N	6	6	6	6	6
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.143	-.143	-.143	-.116	1.000
		Sig. (2-tailed)	.787	.787	.787	.827	.
		N	6	6	6	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.394	248.810		.190	.880
	PDRB	-1.181	4.117	-1.381	-.287	.022
	PDRB PERKAPITA	2.703	11.840	1.709	.228	.017
	INFLASI	4.222	11.131	.764	.379	.069
	JUMLAH PENDUDUK	75.147	253.753	.983	.296	.031

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

8. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.394	248.810		.190	.880
	PDRB	-1.181	4.117	-1.381	-.287	.022
	PDRB PERKAPITA	2.703	11.840	1.709	.228	.017
	INFLASI	4.222	11.131	.764	.379	.069
	JUMLAH PENDUDUK	75.147	253.753	.983	.296	.031

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

9. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304.982	4	76.246	.278	.028 ^b
	Residual	274.265	1	274.265		
	Total	579.247	5			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

b. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, PDRB, PDRB PERKAPITA

10. Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	-1.367	16.56095

a. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, PDRB, PDRB PERKAPITA

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

□



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Lydiah Permata Sari Program Studi : Akuntansi
NPM : 1705170282 Konsentrasi : Akt Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si. Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang diperbaiki	16/2-2022	AS
Bab 2	teori ditambahkan	16/2-2022	AS
Bab 3	metode penelitian dibenarkan	16/2-2022	AS
Daftar Pustaka	system akan penulisan & menaroknya	18/2-2022	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	perbaiki sesuai	18/2-2022	AS
Persetujuan Seminar Proposal	selain Dambungan	23/2-2022	AS

Medan, 18 Februari 2022

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 11 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Lydia Permata Sari*
NPM. : 1705170282
Tempat / Tgl.Lahir : Sei Karang, 27 Desember 19999
Alamat Rumah : Jl. Petumbukan Desa Sei Karang, Kec. Galang
Judul Proposal : Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah dimasukkan fenomena</i>
Bab II	<i>keni disesuaikan</i>
Bab III	<i>populasi dan sampel waktu penelitian dan tempat</i>
Lainnya	<i>sistematisa penulisan dan daftar Pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *11 Maret 2022*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pemanding

Hj. Hafsa, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 11 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Lydiah Permata Sari
NPM : 1705170282
Tempat / Tgl.Lahir : Sei Karang, 27 Desember 19999
Alamat Rumah : Jl. Petumbukan Desa Sei Karang, Kec. Galang
Judul Proposal : Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si*

Medan, 11 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Hj. Hafsa, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menandatangani surat ini agar di sertakan nomor dan tanggalnya

Nomor : 835/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Sudirman, Petapahan Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lydiah Permata Sari
Npm : 1705170282
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Dampak Covid 19 terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabab surat ini agar di sebuikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 839/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Lydiah Permata Sari
N P M : 1705170282
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Dampak Covid 19 terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **01 April 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M



Dekan

H. Hanum, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertiagal.



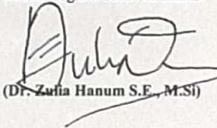
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2157/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/3/2021

Nama Mahasiswa : Lydiah Permata Sari
NPM : 1705170282
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 2/3/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si (15 Maret 2021)

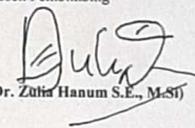
Judul Disetujui**) : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si)

Medan, 09 November 2021

Dosen Pembimbing


(Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si)

Keterangan:
*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2157/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/3/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 2/3/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lydiah Permata Sari
NPM : 1705170282
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Judul 1:
1. Terjadinya pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan secara optimal
2. Adanya hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
Judul 2:
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak reklame
2. Terjadinya proses perizinan dan perpanjangan pajak reklame yang terlalu lama.
Judul 3:
1. Terjadinya kenaikan tingkat kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset
2. Adanya kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau laba
- Rencana Judul : 1. Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang
2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam upaya peningkatan pendapata asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang
3. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- Objek/Lokasi Penelitian : 1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang 2. Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang 3. Bursa Efek Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Lydiah Permata Sari)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 721/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 22 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Jendral Sudirman NO. 2 Lubuk Pakam
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lydiah Permata Sari
N P M : 1705170282
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
I. Janur, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 28 Maret 2022

Nomor :
Lamp : -
Sifat :
Hal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 721/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Menyelesaikan Riset di Badan Pendapatn Asli Daerah, diberitahu Kepada Saudara bahwa Mahasiswa Atas Nama :

Nama Mahasiswa : Lydiah Permata Sari
NPM : 1705170282
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Sepuluh)
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Telah selesai Melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
EBI JAMIAN NASUTION, SE
DELI SERDANG
NIP. 19680919 199503 1 004